

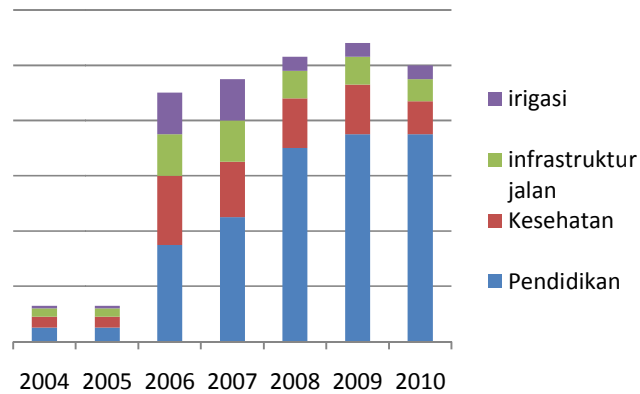
## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Masalah kependudukan merupakan salah satu masalah bagi negara-negara yang sedang berkembang. Angka kelahiran yang tinggi, urbanisasi, penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan salah satu dari beberapa contoh masalah-masalah kependudukan negara-negara sedang berkembang. Angka kelahiran yang tinggi menuntut pemerintah negara-negara berkembang menaikkan fasilitas pelayanan bagi masyarakat contohnya mempersiapkan banyak sekolah, menambah fasilitas kesehatan, dan juga mempersiapkan lapangan kerja.

Indonesia sebagai negara berkembang, dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menyadari pentingnya peran penduduk dalam pembangunan negara. Salah satu contoh kebijakannya yaitu membuat kebijakan 20 persen dana APBN untuk anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tersebut diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas penduduk yang dapat lebih produktif dan kedepannya dapat membantu perekonomian baik secara lingkup makro maupun berpengaruh pada tempat tinggal daerah yang dihuni.



Sumber : Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur

**Gambar 1.1**

**Perkembangan Alokasi DAK per Bidang Tahun 2004-2010 di Jawa Timur**



Sumber: BPS

**Gambar 1.2**

**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur 2002-2010**

**Tabel 1.1**

**Data Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur 2002-2010**

TAHUN	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
IPM	64,1	66,8	68,42	69,18	69,78	70,38	71,06	71,62

Sumber: BPS (satuan persen)

Berbicara keadaan penduduk suatu negara maka yang perlu dilihat adalah tingkat IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Hasil kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah dijelaskan sebelumnya ditunjukkan pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2. Gambar 1.1 memberikan bukti bahwa adanya peningkatan anggaran bagi beberapa bidang, sebagai contoh pelaksanaan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) pemerintah di Provinsi Jawa Timur, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Beberapa bidang yang signifikan dalam pelaksanaan alokasi khusus pemerintah tersebut antara lain pendidikan, kesehatan, irigasi dan infrastruktur jalan. Hasilnya ditunjukkan oleh Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 menunjukkan perbedaan sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan dilihat dari pertumbuhan IPM.

IPM merupakan wujud perhitungan skala keberhasilan pembangunan manusia. Sebelum adanya IPM negara-negara dunia hanya melihat ukuran pembangunan dari suatu ukuran ekonominya saja. Todaro (2000) menyatakan prinsip "*trickle down effect*" yang mana kemajuan pembangunan akan menetes secara sendirinya sehingga menghasilkan peluang dalam ekonomi. Peluang tersebut menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan dalam distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara bersama-sama dan lebih merata.

Adanya kelemahan tolak ukur keberhasilan suatu negara yang dipaparkan Todaro tersebut maka dunia memakai tolak ukur baru dalam menentukan keberhasilan pembangunan sosial-ekonomi yaitu IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM merupakan indikator yang populer dan paling sering digunakan untuk menganalisis kesejahteraan sosial-ekonomi suatu negara. IPM pertama kali

diperkenalkan pada awal tahun '90-an, dengan 3 kriteria indikator dari IPM yang menjadi tolak ukurnya antara lain ketahanan hidup, pengetahuan dan yang terakhir standart hidup.

Pengukuran IPM memungkinkan negara maupun wilayah yang bila dilihat secara pendapatan per kapitanya cenderung sama bahkan ternyata dikategorikan maju, namun apabila dilihat melalui IPM hasilnya bisa saja terlampau berbeda. Contoh nyata dalam pernyataan ini seperti Indonesia dibandingkan negara-negara G-20, rata-rata negara anggota G-20 merupakan negara maju secara PDB namun apabila dilihat dari angka IPM peringkat Indonesia bukanlah termasuk negara maju diantara sebagian besar negara-negara G-20.

Peningkatan IPM merupakan hal yang sangat baik khususnya bagi suatu daerah. Naiknya IPM, khususnya dalam kabupaten/kota dapat ikut membantu produktivitas suatu daerah serta ikut memajukan pembangunan daerah namun ada konsekuensi dari tingkat IPM yang naik tersebut yaitu migrasi penduduk. Migrasi penduduk sebagai contoh dari desa ke kota terjadi atas pilihan untuk mencari penghidupan yang lebih baik secara ekonomi atau pilihan pendidikan dan fasilitas yang lebih memadai. Harapan yang ingin dicapai karena di tempat yang ditinggalkan tidak mampu memberikan pilihan-pilihan lebih.

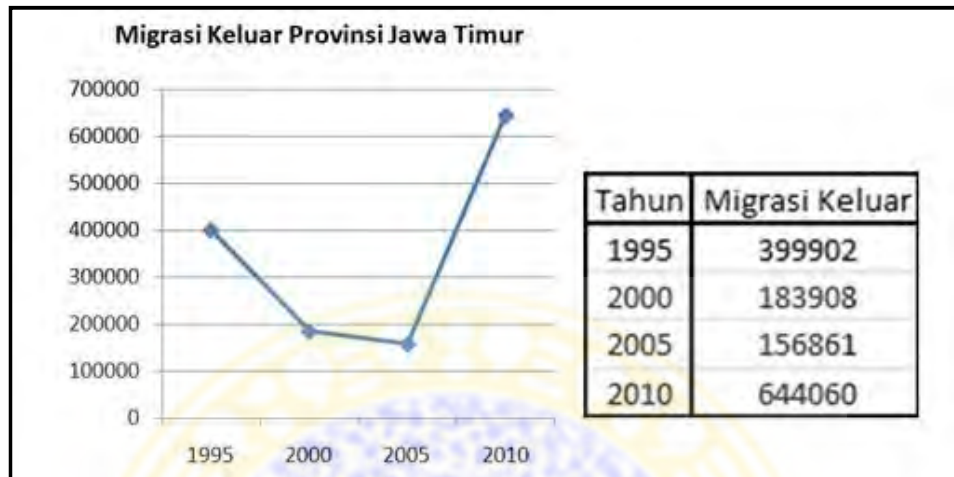
Menurut Tjiptoherijanto dalam Kuncoro (2012) mengenai masalah migrasi dan urbanisasi, perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan menjadi salah satu bagian dari proses pembangunan. Proses urbanisasi di Indonesia diperkirakan akan lebih banyak disebabkan migrasi desa-kota, yang

didasarkan pada makin rendahnya pertumbuhan alamiah penduduk di daerah perkotaan, relatif lambannya perubahan status dari daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan, serta relatif kuatnya kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan yang "urban bias", sehingga memperbesar daya tarik daerah perkotaan bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan. Tjiptoherijanto dalam Kuncoro, 2012:234-235) selanjutnya menjelaskan bahwa untuk menunjang urbanisasi perkotaan, maka penduduk wilayah desa harus mengalami perubahan sifat penduduk perkotaan secara positif. Sifat-sifat dari penduduk kota yang positif seperti pendidikan yang tinggi, kesehatan dan lingkungan yang baik serta pertumbuhan ekonomi yang memadai maka akan meningkatkan kualitas urbanisasi kota bahkan dapat membangun pertumbuhan kualitas pedesaan.

Migrasi merupakan peristiwa yang sangat erat dalam suatu penduduk. Teori migrasi dari Everett S. Lee (1966) mengatakan bahwa migrasi terjadi karena adanya faktor dorong (daerah asal) maupun faktor tarik (daerah tujuan). Faktor-faktor ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis apabila dilihat dari daerah asalnya dikatakan positif apabila faktor tersebut lebih baik dari daerah tujuan, negatif apabila faktor tersebut merupakan kekurangan dari daerah asal yang mengharuskan untuk pindah dan yang terakhir adalah netral apabila faktor tersebut dinilai tidak ada bedanya baik di daerah asal maupun di daerah tujuan.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 Jumlah migrasi keluar seumur hidup dari Provinsi Jawa Timur mencapai angka 3 juta lebih yang mana dihimpun dalam kurun waktu 1971-2010. Gambar 1.3

menunjukkan berapa banyak migrasi keluar dari empat periode sensus terakhir dari tahun 1995-2010.



Sumber : Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.3**

### **Migrasi Keluar Provinsi Jawa Timur Periode 1995-2010**

Dilihat dari Gambar 1.3 tersebut, semakin banyaknya migrasi keluar terjadi di Provinsi Jawa Timur antara rentang tahun 2005 ke 2010. Kenaikan yang cukup drastis dari migrasi keluar. Bukti kenaikan angka migrasi keluar pada tahun 2005-2010 ini semakin menguatkan, apakah ada hubungan faktor dorong dari kenaikan indikator-indikator IPM pada rentang tahun yang sama seperti yang sebelumnya telah dipaparkan tersebut di Provinsi Jawa Timur.

IPM memiliki 3 indikator menurut BPS yaitu indikator kesehatan, indikator pendidikan dan indikator daya beli. Hubungan dengan migrasi keluar yang terjadi dengan ketiga indikator ini sangatlah erat karena objek yang diteliti adalah sama yaitu penduduk. Teori dorong-tarik dari migrasi apabila dilihat dari faktor daerah asalnya maka dapat di indikasikan ketiga indikator-indikator IPM

tersebut menjadi faktor dorong dari daerah asal para migran yang memutuskan untuk bermigrasi keluar.

Penelitian Nguyen (2013) dengan judul "*Rural-Urban Migration, Household Vulnerability and Welfare in Vietnam*" mengungkapkan bahwa peningkatan pendidikan dari daerah asal (desa) merupakan faktor dorong dari daerah asal desa yang mengakibatkan adanya migrasi ke kota. Tingkat pendidikan para migran yang menjadi objek penelitian ini signifikan dengan angka migrasi keluar yang terjadi di Vietnam. Penelitian Logan (2008) mengungkapkan bahwa pengaruh migrasi penduduk negara-negara di Afrika ke Amerika tahun 1870-1910 yaitu angka kesehatan dan gizi. Angka kesehatan dan gizi yang baik dianalisis sebagai faktor pendorong yang positif signifikan terhadap migrasi keluar penduduk Afrika ke Amerika.

Todaro (2004) juga mengungkapkan bahwa migrasi merupakan suatu proses yang secara selektif mempengaruhi setiap individu dengan ciri-ciri ekonomi, sosial, pendidikan dan demografi tertentu, maka setiap pengaruhnya secara relatif terhadap faktor-faktor ekonomi maupun non-ekonomi dari masing-masing individu akan sangat bervariasi. Variasi tersebut tidak hanya terdapat pada arus migrasi antara bangsa dan antar wilayah nasional, melainkan juga antar daerah dalam negara yang sama. Adanya pengaruh faktor sosial-ekonomi terhadap migrasi desa-kota yang juga dikemukakan oleh Lee tersebut semakin menguatkan bagaimana perubahan internal dari migran terhadap keputusan bermigrasi. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebagai ukuran berbagai indikator sosial ekonomi yang dipakai dalam penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap

peristiwa migrasi keluar yang terjadi dalam lingkup Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setelah memaparkan latar belakang penelitian maka selanjutnya adalah menentukan rumusan masalah. Rumusan masalah yang ditanyakan adalah, apakah perubahan ketiga indikator IPM (indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan indikator daya beli) berpengaruh terhadap peristiwa migrasi keluar yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka selanjutnya yaitu menentukan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara indikator-indikator IPM yaitu indikator kesehatan, indikator pendidikan dan indikator daya beli terhadap peristiwa migrasi keluar di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat untuk melihat hubungan faktor dorong dari daerah asal migran. Peristiwa migrasi kebanyakan meneliti melalui migrasi masuk, contohnya penelitian tentang urbanisasi perkotaan. Melihat peristiwa migrasi keluar dari daerah asal yang ditinjau dengan indikator-indikator pembangunan manusia merupakan hal yang cukup jarang dilakukan. Melihat indikator-indikator pembangunan manusia dengan peristiwa migrasi keluar akan memberikan kesimpulan berbeda tentang keputusan penduduk yang memutuskan untuk pindah dari daerah asal. Mengetahui hubungan indikator-indikator IPM terhadap



peristiwa kependudukan (migrasi) juga dapat mengambil kesimpulan lain tentang langkah selanjutnya dalam memberdayakan masyarakat selain hanya untuk menambah kualitas kependudukan yang selama ini hanya dilihat dari indikator-indikator IPM.

